KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan Berkat, Kasih dan KaruniaNyalah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mampu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada Tujuan EKPPD yakni menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Upaya peningkatan Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seluruh hasil Kegiatan baik yang menyangkut Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan APBD di tahun 2025, berikut permasalahan dan solusi terangkum secara singkat dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1), bahwa Kepala

Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika dan Materi Laporan ini Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini merupakan Progrees Report Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah sebagai sarana pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dan telah direviu oleh Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Semoga Laporan bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya dengan semangat kebersamaan kita bangun ”**Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau”** Kabupaten Gunung Mas ini menjadi Kabupaten yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.

Kuala Kurun, 31 Maret 2026

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2025 menyajikan pengukuran sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan, yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja.

Berikut disajikan data Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 Berdasarkan RPJMD dalam tabel 2.3.1. sebagaimana dapat dilihat di bawah ini ini:

Tabel 2.3.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 Berdasarkan RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : "MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI " **MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan** **MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**	**Tujuan 1. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**		**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**67,63**	**70,13**	**72,63**	**75,13**	**77,63**	**80,13**
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	52,55	53,65	54,75	55,85	56,95	58,05
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas wilayah	Poin	80,93	81,75	82,56	83,37	84,19	85,00
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase desa mandiri	%	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		**Penurunan intensitas emisi GRK**	**%**	**761,073.91**	**974,049.19**	**974,049.19**	**1,107,517.29**	**1,236,278.60**	**1,384,322.50**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif **MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi**		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	78,26	78,47	78,68	78,89	79,1	79,30
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks risiko bencana	Poin	123,56	121,85	120,14	118,42	116,71	115
	Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing		**Indeks pembangunan manusia**	**Poin**	**74,17**	**74,64**	**75,12**	**75,59**	**76,06**	**76,53**
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Poin	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
		Sasaran 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	82,54	82,78	83,01	83,25	83,49	83,72
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,560	0,555	0,546	0,54	0,534	0,530
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pembangunan SDM	Indeks pembangunan kebudayaan	Poin	58,53	58,82	59,12	59,41	59,71	60,00

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Poin	62,36	62,98	63,61	64,25	64,89	65,84
	Tujuan 4: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Wilayah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mendukung Tranformasi Ekonomi		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,00**	**5,20**	**5,40**	**5,60**	**5,80**	**6,00**
			PDRB per kapita	**Juta Rp/Kapita**	**70,00**	**71,00**	**72,00**	**73,00**	**74,00**	**75,00**
		Sasaran 4.1 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Poin	6,50	6,52	6,54	6,56	6,58	6,60
		Sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE kategori industri pengolahan	%	2,28	3,03	3,77	4,51	5,26	6,00
		Sasaran 4.3. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah*	%	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45	4,47
	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**4,61**	**4,41**	**4,21**	**4,00**	**3,80**	**3,60**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini rasio	Poin	0,244	0,238	0,232	0,226	0,220	0,214
		Sasaran 5.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,94	2,76	2,58	2,40	2,22	2,04
	Tujuan 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel		**Indeks reformasi birokrasi**	**Poin**	**60,00**	**62,00**	**64,00**	**66,00**	**68,00**	**70,00**
			Indeks daya saing daerah	**Poin**	**3,35**	**3,43**	**3,52**	**3,60**	**3,68**	**3,76**
		Sasaran 6.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Poin	63,03	64,42	65,82	67,21	68,61	70,00
		Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks pelayanan publik	Poin	2,50	2,62	2,75	2,87	3,00	3,12

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 6.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks integritas nasional	Poin	74,59	75,67	76,75	77,84	78,92	80,00

Dalam proses penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan tahap-tahap untuk penyusunan IKU untuk semua Perangkat Daerah yang ditetapkan sebanyak 4 Misi, 17 Sasaran Strategis, dan 26 IKU.

Berdasarkan tabel data Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 Berdasarkan RPJMD di atas, kemudian disusunlah Identifikasi Sasaran Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2025-2029, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.2.
Identifikasi Sasaran Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1 PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN						
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	**A.** Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi **B.** Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik **C.** Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup	**1.** Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal **2.** Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan **3.** Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan **4.** Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan **5.** Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum
					Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Pekerjaan Umum
					Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Dinas Pekerjaan Umum
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah			Indeks konektivitas w	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum
3	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah			Persentase desa mar	Program penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup			Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan
5	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah			Indeks risiko bencana	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MISI 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING						
6	Meningkatnya kualitas pendidikan	A. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS B. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul C. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara	1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai 2. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat 4. Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi 5. Peningkatan pendidikan dan partisipasi pembangunan bagi perempuan 6. Penguatan keluarga yang sehat dan sejahtera 7. Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan kebudayaan yang tinggi	Indeks pendidikan	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
					Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Indeks kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program pengarustamaan gender dan perlindungan perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program peningkatan kualitas keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI 3 PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF						
10	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	**A.** Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat **B.** Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan **C.** Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	**1.** Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran **2.** Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas) **3.** Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah **4.** Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru **5.** Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal **6.** Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas	LPE kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian
11	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi			LPE Kategori Industri Pengolahan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
12	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah			Kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat			Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Seluruh Kecamatan
14	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas			Tingkat Pengangguran Terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil
					Program pengawasan ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

MISI 4 PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI						
15	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**A.** Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima **B.** Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	**1.** Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif **2.** Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik **3.** Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah **4.** Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah yang bebas korupsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat	Sekretariat Daerah
					Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi			Indeks Pelayanan Publik.	Program riset dan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
17	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas			Indeks Integritas Nasional	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Program penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

Tabel 2.3.3.
Identifikasi Proses Utama (Sasaran) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

NO	PROSES	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Utama
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Utama
3	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Utama
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Utama
5	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Utama
6	Meningkatnya kualitas pendidikan	Utama
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Utama
8	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Utama
9	Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Utama
10	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Utama
11	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	Utama
12	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Utama
13	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Utama
14	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Utama
15	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Utama
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Utama
17	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Utama

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan kategorisasi Pencapaian Kinerja Program berdasarkan capaian rata-rata atas indikator (*outcome*) menjadi empat kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3.4. Kategori Capaian Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan target yang termuat dalam Tabel 2.3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 Berdasarkan RPJMD, maka capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MASYARAKAT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MASYARAKAT diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Sasaran Strategis 1: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
01. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat				
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DINAS PEKERJAAN UMUM
		2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DINAS PEKERJAAN UMUM
		5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DINAS PEKERJAAN UMUM
		2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DINAS PEKERJAAN UMUM
		3	Penyediaan Unit pengolahan setempat	DINAS PEKERJAAN UMUM
		4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
		2	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		3	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DINAS PEKERJAAN UMUM

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	52.55	52.27	99.47		DINAS PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MASYARAKAT yang diukur dengan Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 99.47%.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis 2: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
02. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah				
1	Program penyelenggaraan jalan	1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		2	Pemeliharaan Rutin Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		3	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		4	Pemeliharaan Berkala Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		5	Penggantian Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		6	Rehabilitasi Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		7	Rekonstruksi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
		9	Pembangunan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	3	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka	80.93	81.3	100.46		DINAS PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH yang diukur dengan Indikator Indeks Konektivitas Wilayah, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 100.46%.

SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3: MENINGKATNYA PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Sasaran Strategis 3: MENINGKATNYA PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
03. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah				
1	Program Penataan Desa	1	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3: MENINGKATNYA PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 3	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	4	Persentase Desa Mandiri	%	14.04	4.39	31.27	sumber data berdasarkan Indeks Desa Tahun 2025 dengan Jumlah Desa Mandiri sebanyak 5 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk

SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKATNYA PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH yang diukur dengan Indikator Persentase Desa Mandiri, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Rendah dengan capaian 31.27%.

SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4: MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Sasaran Strategis 4: MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
04. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup				
1	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
		2	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
		3	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
		4	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
		5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
		6	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

Tabel 4.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4: MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 4	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78.26	76.09	**97.23**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH), persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 97.23%.

SASARAN STRATEGIS 5
MENINGKATNYA KUALITAS ANTISIPASI DAN PENANGANAN BENCANA DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 5: MENINGKATNYA KUALITAS ANTISIPASI DAN PENANGANAN BENCANA DAERAH diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.
Sasaran Strategis 5: MENINGKATNYA KUALITAS ANTISIPASI DAN PENANGANAN BENCANA DAERAH

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
05. Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah				
1	Program penanggulangan bencana	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		7	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		8	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		10	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		12	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		13	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		14	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		15	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 5.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 5: MENINGKATNYA KUALITAS ANTISIPASI DAN PENANGANAN BENCANA DAERAH

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 5	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123.56	115.53	93.50		BPBD

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 5: MENINGKATNYA KUALITAS ANTISIPASI DAN PENANGANAN BENCANA DAERAH diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 93.50%

SASARAN STRATEGIS 6
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 6: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1.
Sasaran Strategis 6: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
06. Meningkatnya kualitas pendidikan				
1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	Program pengelolaan pendidikan	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		11	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		13	Pembangunan Laboratorium	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		19	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		20	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		21	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		22	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		24	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		27	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		28	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

		29	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		30	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		31	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		32	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		33	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		34	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		35	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tabel 6.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 6: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 6	Meningkatnya kualitas pendidikan	9	Indeks Pendidikan	Indeks	65.78		**0.00**	Data belum dipublish oleh BPS, perkiraan publish di 27 Februari 2026	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 6: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN yang diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan, persentase capaian belum dapat dinilai karena sampai laporan ini dibuat, data masih belum tersedia.

SASARAN STRATEGIS 7
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 7: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1.
Sasaran Strategis 7: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
07. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DINAS KESEHATAN
		2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		3	Pengembangan Puskesmas	DINAS KESEHATAN
		4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DINAS KESEHATAN
		5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DINAS KESEHATAN
		6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		9	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	DINAS KESEHATAN
		10	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN
		18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN
		20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN
		23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DINAS KESEHATAN
		25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN
		26	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		27	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	DINAS KESEHATAN
		29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	DINAS KESEHATAN
		30	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINAS KESEHATAN
		31	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		32	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	DINAS KESEHATAN

		33	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	DINAS KESEHATAN
		34	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN
		35	Operasional Pelayanan Puskesmas	DINAS KESEHATAN
		36	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DINAS KESEHATAN
		37	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
		38	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	DINAS KESEHATAN
		39	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DINAS KESEHATAN
		40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
		41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	DINAS KESEHATAN
		42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	DINAS KESEHATAN
		43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DINAS KESEHATAN
		44	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DINAS KESEHATAN
		45	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	DINAS KESEHATAN
		46	Pengelolaan Layanan Imunisasi	DINAS KESEHATAN
		47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	DINAS KESEHATAN
		48	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN
		50	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		51	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		52	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	DINAS KESEHATAN
		53	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN
		55	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		56	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
		57	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		58	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN
2	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN
		3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DINAS KESEHATAN

Tabel 7.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 7: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Indeks Kesehatan	Indeks	82.54	0	**0.00**	data belum rilis oleh BPS (perkiraan rilis 27 Februari 2025)	DINAS KESEHATAN

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 7: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT diukur melalui indikator Indeks Kesehatan, persentase capaian belum dapat dinilai karena sampai laporan ini dibuat, data masih belum tersedia.

SASARAN STRATEGIS 8
MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 8: MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.1.
Sasaran Strategis 8: MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
08. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan				
1	Program pengarustamaan gender dan perlindungan perempuan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		5	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		6	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 8.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 8: MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 8	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.56		0.00	belum rilis ,Masih memakai capaianTahun 2024,baru rilis 27 februari 2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 8: MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH diukur melalui indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG), persentase capaian belum dapat dinilai karena sampai laporan ini dibuat, data masih belum tersedia.

SASARAN STRATEGIS 9

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SDM YANG BERBUDAYA DAN KEHIDUPAN YANG BERKUALITAS

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 9: MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SDM YANG BERBUDAYA DAN KEHIDUPAN YANG BERKUALITAS diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.1.
Sasaran Strategis 9: MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SDM YANG BERBUDAYA DAN KEHIDUPAN YANG BERKUALITAS

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
09. Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas				
1	Program pengembangan kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2	Penetapan Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3	Pelindungan Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 9.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 9: MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 9	Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berbudaya dan Kehidupan yang Berkualitas	12	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	58.53	58.53	**100.00**	IPK bertahan karena adanya dukungan yang intens dari PEMDA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.1	62.2	**98.57**		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 9: MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN yang diukur melalui indikator:

1. **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 100.00%**

2. **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 98.57%**

SASARAN STRATEGIS 10
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 10: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10.1.
Sasaran Strategis 10: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah				
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DINAS PERTANIAN
		2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DINAS PERTANIAN
		3	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	DINAS PERTANIAN
		4	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	DINAS PERTANIAN
		5	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	DINAS PERTANIAN

Tabel 10.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 10: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 10	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	17	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6.5	4.23	**65.08**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 10: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH diukur melalui indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Rendah dengan capaian 65.08%.

SASARAN STRATEGIS 11

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN BERBASIS HILIRISASI

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 11: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN BERBASIS HILIRISASI diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11.1.
Sasaran Strategis 11: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN BERBASIS HILIRISASI

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
11. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi				
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		5	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 11.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 11: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN BERBASIS HILIRISASI

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 11	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	16	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2.28	-0.70	**-30.70**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 11: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN BERBASIS HILIRISASI diukur melalui indikator LPE Kategori Industri Pengolahan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Rendah dengan capaian -30.70 %.

SASARAN STRATEGIS 12
MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 12: MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12.1.
Sasaran Strategis 12: MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
12. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah				
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel 12.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 12: MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 12	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	18	Kontribusi PDRB Kab. Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	%	4.33	4.45	**102.77**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 12: MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH diukur melalui indikator Kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 102.77 %.

SASARAN STRATEGIS 13
MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 13: MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.1.
Sasaran Strategis 13: MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
13. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat				
1	Program perlindungan dan jaminan sosial	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
		2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINAS SOSIAL
		3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL
		4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SELURUH KECAMATAN
		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SELURUH KECAMATAN
		3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SELURUH KECAMATAN
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SELURUH KECAMATAN
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	SELURUH KECAMATAN
		6	Evaluasi Kelurahan	SELURUH KECAMATAN
		7	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	SELURUH KECAMATAN
		8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SELURUH KECAMATAN

Tabel 13.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 13: MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 13	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	20	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0.244	0.255	**95.55**	Data masih data 2024, mengingat data untuk tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS	BPS

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 13: MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT diukur melalui indikator Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio), persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 95.55%.

SASARAN STRATEGIS 14
MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERKUALITAS

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 14: MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERKUALITAS diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14.1.
Sasaran Strategis 14: MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERKUALITAS

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
14. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas				
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 14.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 14: MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERKUALITAS

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 14	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.94	3.31	**87.41**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 14: MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERKUALITAS diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 87.41 %.

SASARAN STRATEGIS 15
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 15: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15.1.
Sasaran Strategis 15: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
15. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
1	Program Kepegawaian Daerah	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		4	Pengelolaan Data Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5	Pengelolaan Mutasi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		6	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		7	Pengelolaan Promosi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		8	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		9	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		10	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		11	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		12	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		13	Pembinaan Disiplin ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		14	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	SEKRETARIAT DAERAH
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	SEKRETARIAT DAERAH
		5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	SEKRETARIAT DAERAH
		6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH

		7	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SEKRETARIAT DAERAH
		8	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		9	Fasilitasi Bantuan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
		10	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
		11	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	SEKRETARIAT DAERAH
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		8	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		9	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		10	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		11	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tabel 15.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 15: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 15	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	24	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	63.03	61.78	98.02	data masihsangat sementara, dalam masa sanggah belum LHE final (sumber : KEMENPANRB)	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 15: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 98.02%.

SASARAN STRATEGIS 16

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 16: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16.1.
Sasaran Strategis 16: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi				
1	Program Riset dan Inovasi Daerah	1	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		2	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		3	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		4	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		5	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		6	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		7	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		8	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		9	Penyediaan Akses Internet	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		10	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tabel 16.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 16: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		2	3	4	5	6		7	8
SASARAN 16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	25	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2.5	3.37	134.80		SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 16: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 134.80%.

SASARAN STRATEGIS 17
MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 17: MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS diukur melalui capaian program dan sub kegiatan yang dipetakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17.1.

Sasaran Strategis 17: MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS

NO	PROGRAM	NO	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
17. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas				
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		14	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		15	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		16	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		17	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		19	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		20	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		21	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		22	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		23	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		24	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		25	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		26	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		27	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		28	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		29	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		30	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		31	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		32	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		33	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		34	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		35	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT
		3	Reviu Laporan Kinerja	INSPEKTORAT
		4	Reviu Laporan Keuangan	INSPEKTORAT
		5	Pengawasan Desa	INSPEKTORAT
		6	Kerja Sama Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
		7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT
		8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	INSPEKTORAT
		9	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	INSPEKTORAT

Tabel 17.2.
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 17: MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS

SASARAN STRATEGIS		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
SASARAN 17	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih,transparan dan berkualitas	26	Indeks Integritas Nasional	Persentase	74.59	74.56	**99.96**	Sumber data: https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/history?tahun=2025&instansi_name=PEMERINTAH+KABUPATEN+GUNUNG+MAS&instansi_id=369948/ INSPEKTORAT,	INSPEKTORAT

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 17: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI diukur melalui indikator Indeks Integritas Nasional, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 99.96%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rpjmd Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 Sesuai Tarikan Aplikasi Sipd- Ri Bina Bangda

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN		KETERANGAN	SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
					2025	2025	CAPAIAN (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
TUJUAN 1	**Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**	**1**	**Indeks Infrastruktur**	Angka	67,63	67,803	**100,26**		DINAS PEKERJAAN UMUM
SASARAN 1.1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	52,55	52,27	**99,47**		DINAS PEKERJAAN UMUM
SASARAN 1.2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	3	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka	80,93	81,3	**100,46**		DINAS PEKERJAAN UMUM
SASARAN 1.3	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	4	Persentase Desa Mandiri	%	14,04	4,39	**31,27**	sumber data berdasarkan Indeks Desa Tahun 2025 dengan Jumlah Desa Mandiri sebanyak 5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

								Desa	
TUJUAN 2	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**5**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	TON CO2 EQ	761.073,91			Nilai GRK tidak bisa ditampilkan karena Aplikasi Signsmart tidak dapat Akses untuk sementara oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
SASARAN 2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78,26	76,09	**97,23**		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
SASARAN 2.2	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,56	115,53	**93,50**		BPBD
TUJUAN 3	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul,Berbudaya dan Berdaya Saing**	**8**	**Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	74,17	74,46	**100,39**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
SASARAN 3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	9	Indeks Pendidikan	Indeks	65,78		**0,00**	Data belum dipublish oleh BPS, perkiraan publish di 27 Februari 2026	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SASARAN 3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Indeks Kesehatan	Indeks	82,54	0,829	**1,00**	data belum rilis oleh BPS (perkiraan rilis 27 Februari 2025)	DINAS KESEHATAN
SASARAN 3.3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,56		**0,00**	belum rilis ,Masih memakai capaianTahun 2024,baru rilis 27 februari 2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SASARAN 3.4	Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berbudaya dan Kehidupan yang Berkualitas	12	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	58,53	58,53	**100,00**	IPK bertahan karena adanya dukungan yang intens dari PEMDA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,1	62,2	**98,57**		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TUJUAN 4	**Meningkatkan pembangunan ekonomi**	**14**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	%	5	4,53	**90,60**	INDIKATOR MAKRO	BPS

	wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung tranformasi ekonomi							DAERAH	
		15	**PDRB per kapita**	Rp. Juta Per Tahun	70	72,37	**103,38**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
SASARAN 4.1	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	16	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2,28	-0,70	**-30,70**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
SASARAN 4.2	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	17	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,5	4,23	**65,08**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
SASARAN 4.3	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	18	Kontribusi PDRB Kab. Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	%	4,33	4,45	**102,77**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
TUJUAN 5	**Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**	**19**	**Tingkat Kemiskinan**	(%)	4,61	5,48	**87,00**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
SASARAN 5.1	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	20	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,244	0,255	**95,55**	Data masih data 2024, mengingat data untuk tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS	BPS
SASARAN 5.2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,94	3,31	**87,41**	INDIKATOR MAKRO DAERAH	BPS
TUJUAN 6	**Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional,bersih,dan akuntabel**	**22**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	60	57,14	**95,23**	data masihsangat sementara, dalam masa sanggah belum	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

								LHE final (sumber : KEMENPANRB)	
		23	**Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	3,35	3,30	**98,51**		BAPPERIDA
SASARAN 6.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	24	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	63,03	61,78	**98,02**	data masihsangat sementara, dalam masa sanggah belum LHE final (sumber : KEMENPANRB)	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI
SASARAN 6.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	25	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,5	3,37	**134,80**		SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI
SASARAN 6.3	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih,transparan dan berkualitas	26	Indeks Integritas Nasional	Persentase	74,59	74,56	**99,96**	Sumber data: https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/history?tahun=2025&instansi_name=PEMERINTAH+KABUPATEN+GUNUNG+MAS&instansi_id=369948/ INSPEKTORAT,	INSPEKTORAT